



Pengaruh Pertumbuhan BUMDes di Daerah Tertinggal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah

Aminah Ulil Albaab

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Darmawan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Korespondensi penulis: 21108030044@student.uin-suka.ac.id

Abstrak. *This study aims to analyze the effect of the growth of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in disadvantaged areas on economic growth in Central Java Province. This study uses data on the Central Java economy in 2023. The results of the analysis show that BUMDes has the potential to increase Village Original Revenue (PAD) and develop businesses in the area. However, economic growth in Central Java is still limited by the presence of underdeveloped regions that negatively affect economic growth. Therefore, the government needs to pay special attention to underdeveloped areas and provide appropriate policies to develop BUMDes. This study also identifies the factors that influence village own-source revenues generated by BUMDes, such as BUMDes internal factors, government external factors, and market conditions. In addition, this study shows that village own-source revenues generated by BUMDes have a positive influence on economic growth in Central Java through increased community income, job creation, and infrastructure development. In the context of economic growth, the uncertainty theory by Keynes becomes relevant, where uncertainty factors can affect economic conditions that cannot be predicted accurately.*

Keywords: *BUMDes; uncertainty theory; economic growth.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah tertinggal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa BUMDes memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mengembangkan usaha di daerah tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih terbatas oleh adanya daerah tertinggal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap daerah tertinggal dan menyediakan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan BUMDes. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli desa yang dihasilkan oleh BUMDes, seperti faktor internal BUMDes, faktor eksternal pemerintah, dan kondisi pasar. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa yang dihasilkan oleh BUMDes memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan infrastruktur. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, teori ketidakpastian oleh Keynes menjadi relevan, di mana faktor ketidakpastian dapat mempengaruhi kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi dengan akurat.

Kata Kunci: *BUMDes; pertumbuhan ekonomi; teori ketidakpastian.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik (Kementerian Keuangan, 2018). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 mencapai 4,98 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh tiga lapangan usaha dominan, yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Seluruh kategori lapangan usaha dan komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Triwulan III-2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh 4,92 persen secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan II-2023 yang tercatat 5,24 persen, dan Triwulan III-2022 yang mencapai 5,27 persen. Pada Triwulan IV-2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh 4,73 persen. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak akan dapat dicapai apabila masih terdapat daerah yang tertinggal. Wilayah Jawa Tengah merupakan salah satu yang memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi adanya daerah yang tertinggal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menjadi rendah. Sebagaimana yang terdapat pada data Badan Pusat Statistika, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2023 hanya tumbuh sebesar 1,03 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti potensi dan modal perekonomian yang besar, tetapi masih ada risiko perlambatan ekonomi global dan peningkatan tekanan inflasi. Selain itu, pada daerah tertinggal terdapat kendala yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan ketidakpastian.

Untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, pemerintah harus memperhatikan daerah yang tertinggal dan menyediakan kebijakan yang tepat. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi daerah tertinggal adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Iyan, et al., 2020). BUMDes merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa yang berperan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mengembangkan usaha di daerah tersebut (Kurman, et al., 2021). Pemerintah desa melakukan tindakan untuk kemajuan usaha BUMDes dan mewujudkan strategi dari sisi formulasi dan sasaran, pilihan tindakan, dan alokasi sumberdaya alam dan sumberdaya keuangan.

Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah. Penulis menarik perhatian untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh pertumbuhan BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mengembangkan usaha di daerah tersebut.

KAJIAN TEORI

A. Teori Ketidakpastian (*Theory of Uncertainty*)

Keynes (1921, 1936, dan 1937) dan Knight (1921) memperkenalkan gagasan tentang konsep ketidakpastian. Mereka berpendapat bahwa dalam pengambilan keputusan manusia, tidak semua hasil yang mungkin dari tindakan atau keputusan tersebut dapat diprediksi. Knight menekankan bahwa ketidakpastian tidak dapat diasuransikan. Menurut pandangan Keynes, keberadaan ketidakpastian tentang masa depan menyebabkan ekonomi secara alami cenderung menuju kepada pengangguran. Ketidakpastian dianggap sebagai unsur yang tak terelakkan dalam kehidupan manusia (Darmawan, 2021). Teori ketidakpastian dalam konteks pertumbuhan ekonomi adalah teori yang menggambarkan bahwa keadaan ekonomi tidak dapat diperkirakan secara akurat dan dapat terpengaruh oleh faktor-faktor yang tidak dapat disusun atau dihitung.

B. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory atau teori keagenan muncul sebagai solusi untuk menangani permasalahan agensi, yang melibatkan perbedaan perspektif antara prinsipal dan agen dalam menghadapi risiko (Ernati, 2009), serta timbulnya konflik kepentingan karena tidak selarasnya tujuan dan harapan kedua belah pihak (Firmansyah et al., 2020). Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan serta mendelegasikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan otoritasnya (Halim & Abdullah, 2006).

Prinsipal dapat diwakili oleh rakyat dengan pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja dari masyarakat juga mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Selain itu, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditarik dari rakyat sebagai sumber daya keuangan prinsipal akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai agen untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hanifah dan Sulaeman, 2022).

C. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2005), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses dalam meningkatkan *output* dari masa ke masa sehingga menjadi parameter yang signifikan dalam penilaian efektivitas keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih maju selama periode tertentu (Yunianto, Dwi., 2021). Suatu perekonomian dikatakan mengalami perkembangan apabila terjadi peningkatan pada kegiatan ekonomi dibandingkan masa sebelumnya.

D. Pembangunan Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal sering kali menjadi tantangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tertinggal merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga, pembangunan daerah tertinggal menjadi upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Sedangkan menurut Andini, Soeaidy, dan Hayat (2015), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya daerah tertinggal. Pertama, ketersediaan sumber daya menjadi faktor kunci. Ketika suatu daerah kekurangan sumber daya alam, manusia, atau finansial, maka kemampuan dari suatu daerah untuk berkembang menjadi terbatas (Aziza dan Widhiatuti, 2023). Faktor kedua yang dapat mempengaruhi munculnya daerah tertinggal adalah pembangunan infrastruktur. Daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, air bersih, atau listrik, akan kesulitan dalam mengakses layanan penting dan pasar (Aziza dan Widhiatuti, 2023). Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan penting. Ketika masyarakat lokal tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan, pelatihan kerja, atau modal, mereka mungkin tidak

dapat mengoptimalkan potensi mereka secara penuh untuk meningkatkan kondisi daerah mereka (Aziza dan Widhiatuti, 2023). Kombinasi dari ketiga faktor ini seringkali menjadi penyebab utama ketertinggalan suatu daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketertinggalan, perlu dilakukan upaya yang terintegrasi dalam mengatasi masalah ketersediaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

E. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Desa dapat mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan cara menggali potensi-potensi yang dimiliki. Untuk mendorong perekonomian mandiri di desa, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tama dan Yanuardi (2013), menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes adalah untuk memajukan daerah pedesaan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan diversifikasi usaha di pedesaan, meningkatkan ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan, membangun serta memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan.

F. Pengaruh Pendapatan Lokal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

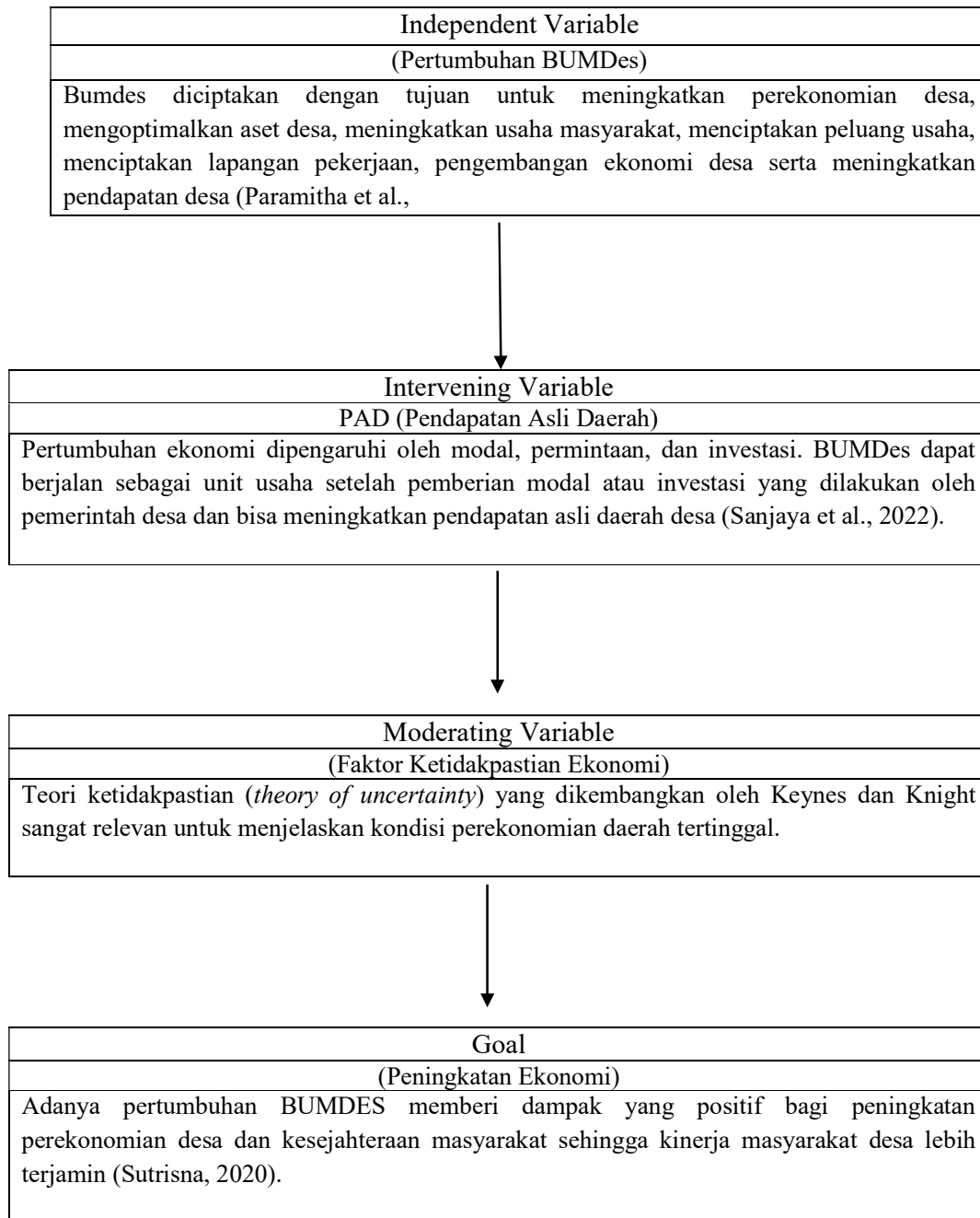
Pendapatan lokal merupakan penerimaan yang diperoleh oleh masyarakat atau pelaku ekonomi di suatu daerah atau lokal. Pendapatan lokal dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah (Widjaja, 2002). Pendapatan lokal memiliki peranan penting dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, serta meningkatkan investasi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan lokal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal melalui *multiplier effect*, peningkatan konsumsi, investasi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Multiplier effect* merupakan efek yang dihasilkan ketika pendapatan lokal digunakan untuk membeli barang-barang lokal, yang akan membuat produsen dan pelaku usaha mengambil keputusan untuk memproduksi lebih banyak, yang akan membuat pendapatan tambahan untuk masyarakat (Eny Haryati, 2010).

Pendapatan lokal dapat mengurangi kemiskinan masyarakat, yang akan mengurangi ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang-barang dan jasa. Peningkatan konsumsi akan meningkatkan permintaan dan membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi (Eny Haryati, 2010). Sedangkan, investasi lokal dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas ekonomi lokal, yang akan

membantu mengurangi ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas ekonomi, yang akan membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan permintaan dan membantu mengurangi ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas ekonomi, yang akan membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi (Eny Haryati, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Chindy Febry Rori (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Sri Wahyuni et al. (2020) menunjukkan bahwa pendapatan lokal, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Aries Suganda (2016) menunjukkan bahwa pendapatan lokal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Barat.



Berdasarkan gambaran kerangka konseptualisasi diatas, terdapat tiga variabel yang dijelaskan, yaitu variabel independen, variabel intervening, dan variabel moderasi. Ketiga variabel diatas memiliki peran yang penting dalam menjelaskan dan memahami terkait pertumbuhan BUMDes yang diasumsikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dengan membangun dan mengelola potensi-potensi di desa serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan upaya penting dalam meningkatkan pendapatan mereka dan kualitas hidup secara keseluruhan. Peran aktif dalam memperkuat perekonomian desa adalah fundamental bagi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) menjadi fondasi utamanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memperluas kemajuan ekonomi masyarakat desa, sambil memberikan bantuan untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik (Dharma et al., 2023).

Adapun variabel independen adalah pertumbuhan BUMDes, yang mana telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2023. Peningkatan jumlah BUMDes ini diduga berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iyan dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa BUMDes berperan penting dalam meningkatkan PAD di tingkat desa. Dengan adanya BUMDes, masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap pasar dan pendanaan untuk mengembangkan usaha mereka. Ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan perekonomian lokal dan peningkatan PAD. Namun, besaran pengaruhnya perlu diukur lebih lanjut.

Variabel intervening yang disebutkan diatas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan PAD dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: kondisi ekonomi makro, dukungan pemerintah, ketersediaan SDM, dan infrastruktur. Kondisi ekonomi makro nasional yang kondusif akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, dan fasilitas akan mendukung pengembangan BUMDes dan peningkatan PAD. Ketersediaan SDM terampil dan infrastruktur yang memadai juga berperan penting. Namun besaran pengaruh masing-masing faktor perlu diukur secara kuantitatif.

Variabel moderasi yang disebutkan dalam kerangka konseptual diatas yaitu adanya faktor ketidakpastian ekonomi. Berdasarkan teori ketidakpastian yang dicetuskan oleh Keynes (2021), Teori ketidakpastian dalam konteks pertumbuhan ekonomi merupakan teori yang menggambarkan bahwa keadaan ekonomi tidak dapat diperkirakan secara akurat dan dapat terpengaruh oleh faktor-faktor yang tidak dapat disusun atau dihitung. Masa depan tidak dapat diprediksi secara pasti karena adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Kondisi ini sangat mempengaruhi daerah tertinggal yang memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap faktor-faktor di luar kendalinya.

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diharapkan bahwa daerah-daerah tertinggal dapat mengembangkan berbagai usaha dan jaringan ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada satu komoditas atau sektor tertentu. BUMDes juga dianggap sebagai alat pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Dengan demikian, teori ketidakpastian menjadi sangat relevan untuk memahami tantangan yang unik di daerah-daerah tertinggal dan merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan melalui BUMDes.

Goals atau tujuan dari pembuatan kerangka konseptual diatas adalah dengan melalui pertumbuhan BUMDes yang kemudian disertai dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arindhawati dan Utami (2020), menyatakan bahwa kehadiran BUMDes berdampak pada perubahan ekonomi dan sosial, termasuk dalam mengurangi tingkat pengangguran di desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah studi literatur, suatu pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data melalui analisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan situs web resmi (Rivai et al., 2023). Studi literatur

memungkinkan peneliti untuk menelusuri berbagai dokumen, data, dan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada literatur yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada pengaruh pertumbuhan BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi penelitian ini didasarkan pada hubungan antara pertumbuhan BUMDes di daerah tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Konsep utama yang menjadi dasar adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam mencapai kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah. penelitian ini mengasumsikan bahwa terdapat daerah tertinggal di Jawa Tengah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Daerah tertinggal ini dapat memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi mengalami kendala yang membatasi pertumbuhan ekonomi, seperti kurangnya akses terhadap sumber daya, infrastruktur yang kurang berkembang, dan ketidakpastian ekonomi.

A. Pertumbuhan BUMDes di Jawa Tengah

Jumlah BUMDes Jawa Tengah Tahun 2017 dan 2023		
Daerah	2017	2023
Cilacap	55	167
Banyumas	0	136
Purbalingga	172	50
Banjarnegara	0	105
Kebumen	84	179
Purworejo	43	153
Wonosobo	69	32
Magelang	77	82
Boyolali	89	20
Klaten	158	38
Sukoharjo	22	91
Wonogiri	86	127
Karanganyar	0	72
Sragen	73	79
Grobogan	0	100
Blora	51	16
Rembang	44	12
Pati	298	39
Kudus	17	62
Jepara	182	32
Demak	49	41
Semarang	87	79
Temanggung	0	50
Kendal	42	25
Batang	81	17
Pekalongan	19	21

Pemalang	166	61
Tegal	8	150
Brebes	21	94
TOTAL	1993	2130

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, menunjukkan bahwa pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga tahun 2023 menunjukkan tren yang signifikan, dengan peningkatan yang mencapai 48,3%. Data terkini menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam mendorong ekonomi lokal semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Peningkatan tersebut tidak hanya tercermin dalam jumlah BUMDes yang muncul di berbagai daerah di Jawa Tengah, tetapi juga dalam beragamnya jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, menunjukkan bahwa jenis usaha BUMDes yang paling diminati adalah jenis usaha yang berada pada bidang Pertanian dan Agribisnis. Dari sektor pertanian hingga industri kreatif, BUMDes telah menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi di tingkat desa. Peningkatan ini diyakini disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah dukungan dari pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan, bantuan modal, dan fasilitas pendukung lainnya bagi pendirian dan pengembangan BUMDes.

Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya berdaya saing ekonomi lokal dan pentingnya memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan mereka juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan ini. Dengan adanya BUMDes, masyarakat desa di Jawa Tengah memiliki akses lebih besar terhadap pasar, pelatihan keterampilan, dan pendanaan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, pertumbuhan BUMDes yang signifikan ini tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi lokal yang kuat, tetapi juga menunjukkan kesuksesan berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa di Provinsi Jawa Tengah.

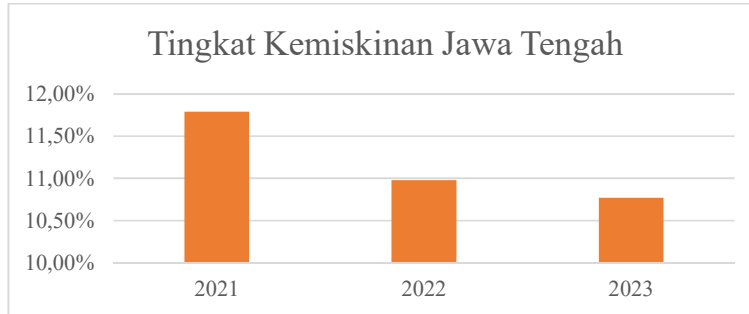
B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan cermin dari kesejahteraan dan kemajuan yang dialami oleh penduduknya. Untuk mengukur seberapa baik sebuah ekonomi berkembang, kita dapat melihat beberapa indikator utama, antara lain PDB per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Pertama, PDB per kapita menjadi salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB per kapita mencerminkan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, dibagi dengan jumlah penduduknya. Semakin tinggi PDB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. PDRB menurut harga konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dan laju pertumbuhan PDRB akan menunjukkan proses kenaikan output per kapita (Bagus Haryo Kusumo, 2022).

Selain itu, tingkat pengangguran juga menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan adanya banyaknya kesempatan kerja bagi penduduk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi, serta mengurangi beban sosial bagi pemerintah. (Bagus Haryo Kusumo, 2022). Pengangguran dapat membawa dampak negatif terhadap proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatasi masalah pengangguran untuk mencegah dampak yang sangat berbahaya.

Tingkat kemiskinan juga merupakan indikator yang sangat penting. Tingkat kemiskinan yang tinggi menandakan adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakmampuan

sebagian besar penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, penurunan tingkat kemiskinan menandakan adanya inklusi sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti dengan penambahan kesempatan kerja mungkin akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan penambahan kesempatan kerja diperlukan untuk mengatasi kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada pada angka 11,79% pada tahun 2021. Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia pada tahun 2021 sebesar 4 persen dengan jumlah orang miskin ekstrem sebanyak 10,86 juta jiwa. Sedangkan, pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berkurang menjadi 10,98%. Ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022, yang menggunakan metodologi pengukuran menggunakan konsep kebutuhan dasar atau *basic needs approach*, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM).

Tahun 2023, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berkurang menjadi 10,77%. Penurunan ini adalah akibat dari percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan pemerintah, yang menciptakan program dan strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

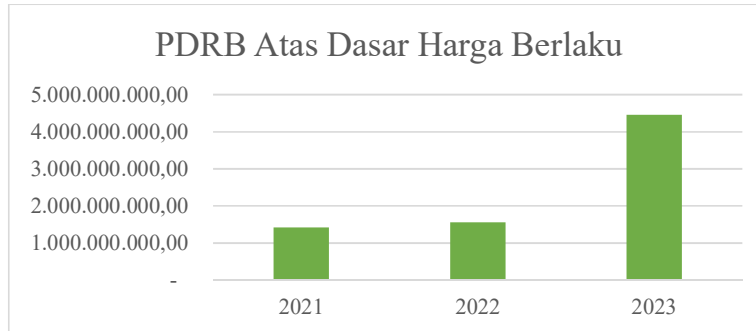


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa tingkat pengangguran di Jawa Tengah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 tingkat pengangguran mencapai 5,95%, kemudian turun menjadi 5,57% pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 5,13% pada tahun 2023.

Penurunan ini menandakan adanya perkembangan positif dalam perekonomian Jawa Tengah selama periode tersebut. Mungkin ada peningkatan investasi, pertumbuhan sektor industri, atau kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Hal ini

memberikan harapan bahwa masyarakat Jawa Tengah memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan mereka.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.

Data PDRB atas dasar harga berlaku di Jawa Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di wilayah tersebut selama periode tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, PDRB Jawa Tengah mencapai Rp1.421.178.060,95 kemudian meningkat menjadi Rp1.560.431.558,36 pada tahun 2022, dan melonjak secara drastis menjadi Rp4.457.343.220,34 pada tahun 2023. Akan tetapi pada tahun 2023 angka tersebut merupakan angka sementara.

Dengan memperhatikan indikator-indikator seperti PDB per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan, kita dapat memahami lebih baik tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari penduduk suatu negara. Peningkatan yang luar biasa ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat di Jawa Tengah, yang mungkin didorong oleh berbagai faktor seperti investasi yang meningkat, ekspansi sektor industri, atau perkembangan proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan ekonomi lokal juga bisa menjadi faktor yang berkontribusi.

BUMDes telah memainkan peran penting dalam memajukan perekonomian di tingkat desa dengan membangun berbagai usaha lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti yang terjadi di Jawa Tengah, BUMDes memiliki potensi yang besar untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Kesimpulan temuan terhadap artikel ini mengungkapkan bahwa pendekatan konseptual ini memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh pertumbuhan BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tergambar bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran sentral dalam menggerak pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal di Provinsi Jawa Tengah. BUMDes tidak hanya berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), tetapi juga bertanggung jawab dalam mengembangkan berbagai usaha lokal di wilayah tersebut. Meski demikian, kendati terdapat upaya yang dilakukan oleh BUMDes, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih dibatasi oleh keberadaan daerah-daerah tertinggal yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari

pemerintah untuk memberikan dukungan dan kebijakan yang tepat guna mengembangkan peran BUMDes di daerah tersebut.

Faktor-faktor baik internal maupun eksternal seperti manajemen internal BUMDes, dukungan kebijakan dari pemerintah, dan kondisi pasar lokal juga turut memengaruhi tingkat Pendapatan Asli Desa yang dihasilkan oleh BUMDes. Dampak dari pendapatan asli desa yang dihasilkan oleh BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tampak melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta perkembangan infrastruktur yang lebih baik. Maka dari itu, pengembangan peran BUMDes harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal di Jawa Tengah, dengan peningkatan pendampingan, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang memadai sebagai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindhawati, A. T. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 43-55.
- Darmawan. (2021). *Ekonomi Keuangan*. UNY Press.
- Dharma, I. P. (2023). Peranan BUMDES Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa Baha Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 51-54.
- Emati. (2009). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*.
- Firmansyah, A. S. (2020). Nilai Perusahaan: Kebijakan Utang, Good Corporate Governance, Cash Holding. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Haryati, E. (2010). Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berorientasi pada Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur. *Ekuitas*.
- Hasna Imtiyaz Hanifah, A. S. (2022). ERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS KORELASI RESIPROKAL . *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.
- Iyan, A. S. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Journal of Environment and Management*.
- Kusumo, B. H. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2019.
- Michael P. Todaro and Smith, S. C. (2003). *Economic Development*. UK: Pearson Education Limited.
- Nur Cisan Imran Kurman, D. S. (2021). Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* .

- Paramita, L. H. (2021). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pusat Perkembangan Ekonomi Desa, Desa Maju Indonesia Sejahtera Bumdes Tanjung Mayan (Danau Teloko) . *Janaka: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia*, 61-72.
- Sanjaya, Y. B. (2022, July). Analisis Pengaruh Bumdes, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen. *In Proceeding of Midyear Internat*.
- Sutrisna, I. W. (2020). Eksistensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangunan ekonomi di desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 8-15.
- Tri Noor Aziza, D. W. (2023). Penanganan Daerah Tertinggal di Indonesia . *Khazabah Intelektual*.
- utami, a. d. (2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung : Literasi Desa Mandiri.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi daerah dan Dareah Otonom*. Raja Grafindo Persada.
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan. *Journal FEB UNMUL*.